

SIARAN PERS

Nomor: 28/HMS/SP/IX/2026

TANGGAL:
21 September 2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Serap Masukan Masyarakat soal Disinformasi dan Politik Uang

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Disinformasi dan politik uang menjadi dua isu yang mendapat perhatian dalam Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama kelompok tani, pemuda, dan tokoh masyarakat di Sekretariat Kelompok Tani Primatani Biyonga, Kecamatan Limboto, Kamis (17/9/2026).

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Zulfikar A. Uba, menyampaikan bahwa masukan masyarakat diperlukan untuk melihat berbagai persoalan dalam pelaksanaan demokrasi dan Pemilu, termasuk tantangan menghadapi maraknya informasi yang tidak benar serta praktik politik uang.

Dalam dialog tersebut, masyarakat mempertanyakan bagaimana menentukan sumber informasi yang valid di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial. Selain itu, peserta juga membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Kami ingin meminta masukan dari masyarakat, apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya maupun saran yang belum sempat disampaikan. Silakan menyampaikan apa yang menjadi masukan dan aspirasi,” ujar Zulfikar.

Menurut Zulfikar, perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, namun pada saat yang sama membutuhkan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Selain disinformasi dan politik uang, masyarakat juga menyampaikan perlunya pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama setelah adanya perkembangan dan putusan terbaru terkait desain penyelenggaraan pemilihan.

Zulfikar menjelaskan bahwa pemilihan secara langsung tetap menjadi bagian dari sistem yang berlaku. Sementara perkembangan desain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu mengacu pada ketentuan serta putusan hukum terbaru.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat perubahan terkait keserentakan pemilihan. Adapun teknis dan regulasi lebih lanjut masih menunggu perkembangan revisi peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.

Zulfikar menyebutkan Pemilu dijadwalkan pada 2029, sementara Pilkada dijadwalkan pada 2031, dengan ketentuan teknis pelaksanaannya tetap menyesuaikan regulasi yang berlaku.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Bawaslu,” kata Zulfikar.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan kelompok tani, Opan, mengapresiasi kehadiran Bawaslu di tengah masyarakat untuk memberikan informasi sekaligus membuka ruang komunikasi secara langsung.

“Pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya petani, juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses demokrasi,” ujar Opan.

Ia turut menyampaikan sejumlah kebutuhan petani, termasuk ketersediaan saluran irigasi dan dukungan terhadap hasil-hasil pertanian. Menurutnya, perhatian terhadap sektor pertanian dapat menjadi bagian dari agenda para politisi maupun anggota legislatif sehingga aspirasi masyarakat dan kebutuhan petani dapat diperjuangkan melalui kebijakan.

Konsolidasi Demokrasi tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan masyarakat untuk menghimpun masukan, aspirasi, kritik, serta harapan terkait pelaksanaan Pemilu dan perbaikan kualitas demokrasi ke depan.

Kegiatan difasilitasi oleh Ketua Kelompok Tani Primatani Biyonga, Sutarjo Abdul, dan diikuti perwakilan kelompok tani, pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. Turut hadir Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rahmawaty M. Sulaiman serta staf.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: humasbawaslukabgor@gmail.com

Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id